

Nasib Petani di Tahun Politik

SETIAP kali pemilihan umum dihelat, baik berupa Pilkada, Pilpres dan Pileg, petani adalah konstituen yang paling banyak menikmati taburan janji. Selain termasuk sebagai kelompok masyarakat pemilih terbesar, isu-isu di seputaran petani juga teramat seksi untuk mendulang suara. Di sisi lain petani adalah kelompok yang teramat "lemah" dalam daya tawar politik, sehingga dengan mudah mereka suatu saat bisa ditinggalkan tanpa kesanggupan untuk menagih janji yang telah diberikan.

Sekarang kita memasuki tahun politik yang penting, dimana 171 daerah akan menghelat pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni nanti. Begitu juga pemilihan presiden dan anggota DPR yang sudah di depan mata. Tahapan Pilkada sendiri sudah dimulai.

Politik "Asbun" dan Kebijakan yang Menghisap

Telah jamak kita dengar, setiap kampanye berlangsung politisi dengan gagah berani akan berucap janji apa saja. Tak peduli rasionalisasinya, yang penting semua bisa. Inilah politik asal bunyi/"asbun" yang sering dimainkan para politisi ketika musim kampanye berlangsung. Kawan setia politik asal bunyi adalah politik asal jadi. Politik asal jadi digunakan untuk merealisasikan program-program pemerintahan. Tak ayal kita akan banyak melihat "monumen-monumen" pembangunan di berbagai tempat, yang merupakan saksi bisu bantuan atau program pemerintah yang tidak tepat sasaran sehingga tidak pernah dimanfaatkan rakyat.

Bagi petani, ujian pertama dan sekaligus terpenting adalah pada saat tahun politik seperti sekarang ini. Seandainya mereka memilih pemimpin yang salah, maka petani akan kembali dihadapkan pada politik asal bunyi dan asal jadi. Lebih parah lagi, petani akan bertemu pemimpin dengan basis moral yang akan menghalalkan penderitaan sebagian orang dan biasanya kelompok yang dinilai lemah

untuk suatu tujuan lain yang dianggap lebih penting atau apa yang disebut dalam teori etika sebagai utilitarianisme. Jika terpilih pemimpin dengan basis moral utilitarianisme, maka, petani harus merelakan dirinya dikorbankan bahkan dikalahkan dalam pertarungan kebijakan nasional.

Kebijakan nasional dan daerah yang mengalahkan petani dan memeras sektor pertanian bisa dengan mudah kita lihat. Salah satunya, pemerintah memiliki kepentingan untuk membuat harga pangan rendah, agar bisa mendorong daya beli masyarakat

lainnya, sehingga perekonomian tumbuh dan investor datang. Keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen dalam konteks komoditi-komoditi pertanian cenderung lebih merugikan petani. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh nilai tukar petani (NTP) yang tidak mampu merangsek naik.

Hal lain, kebijakan proteksi terhadap petani juga lemah dan cenderung abai dalam pelaksanaannya. Sebaliknya proses liberalisasi sektor pertanian terus berjalan. Liberalisasi ini bisa kita lihat mulai dari dipretelinya peran Bulog sampai kepada penghapusan berbagai tarif perdagangan. Mengenai liberalisasi sektor pertanian ini Wanki Moon sudah mengingatkan untuk tidak melakukannya. Wanki Moon menunjukkan alasan bahwa sektor pertanian tidak bisa diliberalisasi atas dasar beberapa hal, yakni: (a) produksi pertanian secara kolektif ter-

kait dengan barang dan jasa non market (lahan, air, biodiversitas, hutan) baik di tingkat lokal maupun nasional; (b) pertanian terasosiasi dengan isu-isu kemanusiaan, seperti perubahan iklim, kesinambungan dan ketahanan pangan; (c) sektor pertanian memiliki peran dan kemampuan yang berbeda-beda antar negara sehingga kekalahan dalam liberalisasi bisa menjadi petaka kemanusiaan.

Kita merindukan pemimpin yang melihat petani sebagai manusia bukan benda mati. Dengan demikian ketika berkuasa dia tidak akan pernah menjadikan petani sebagai objek dari segenap ambisi kebijakannya.

Banyak pemerintah daerah hasil Pilkada, biasanya menginginkan program yang berdampak cepat dan terlihat dalam jangka pendek. Padahal membangun sektor pertanian tidak bisa dengan paradigma sempit seperti itu, karena tidak semua hasil bisa dinikmati dalam waktu cepat. Misalnya dalam hal yang terkait dengan pembenahan sumber daya manusia sektor pertanian, sudah pasti memerlukan waktu dan kesabaran. Akibat kepentingan politik sempit tersebut, tidak

mengherankan berbagai polemik kelembagaan pertanian terjadi di daerah, sehingga menghambat kemajuan dan kesejahteraan petani.

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah dibuat pemerintah bersama DPR juga terlihat mandeg dalam realisasinya. Studi yang dilakukan Syahyuti (2014) mengenai implementasi undang-undang ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan berkaitan dengan organisasi petani belum ideal, sosialisasi undang-undang ini masih lemah, dan petani sendiri belum memahami kesempatan yang telah disediakan. Artinya pemimpin yang dipilih petani melalui proses demokrasi, belum

serius mengurus soal perlindungan dan pemberdayaan petani itu sendiri, meskipun telah menjadi sebuah regulasi.

Pemerintah yang didukung para politisi hasil pemilihan umum sudah terlalu sering mengeluarkan kebijakan atas nama kesejahteraan petani. Namun hasilnya bisa kita lihat. Amat memilukan. Sejak tahun 2011 sampai 2017, ketika rata-rata orang Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan lebih dari 20%, petani kita malah hampir tidak mengalami peningkatan kesejahteraan sama sekali. Indeks nilai tukar petani selama 6 tahun tersebut hanya meningkat 1,4% saja. (SDG Center Unpad, 2018).

Harapan di Tahun Politik

Tahun politik 2018 dan 2019 ini akan menjadi sumbu penegak keadilan jika kita bisa membalik politik "asal bunyi" dan kebijakan yang menghisap menjadi politik yang berkeadilan dan kebijakan yang berkeadaban. Pemilihan umum sebagai representasi demokrasi rakyat harus menjadi jalan kesejahteraan bagi petani. Kita tidak saja ingin membangun politik harapan, tetapi juga politik berkeadilan. Politik yang mampu melawan banalitas kekuasaan itu sendiri. Politik yang melahirkan seorang pemimpin yang tidak akan kehilangan perasaan terhadap petani sebagai rakyat paling marginal di republik ini. Kita merindukan pemimpin yang melihat petani sebagai manusia bukan benda mati. Dengan demikian ketika berkuasa dia tidak akan pernah menjadikan petani sebagai objek dari segenap ambisi kebijakannya.

Kita ingin, tercipta *high* politik. Yakni politik yang tegak lurus pada misi bernegara. Politik yang tidak diombang-ambing oleh kepentingan sempit. Politik yang kembali kepada kesejatiannya. Politik yang diucapkan dengan pikiran tidak dengan mengumbar hawa nafsu kuasa. (*)

RAFNEL AZHARI

Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unand
Peneliti PUI Pangan Inklusif Unand